

KOMISI III DPR RI

Analisis

PAGU ANGGARAN

2025

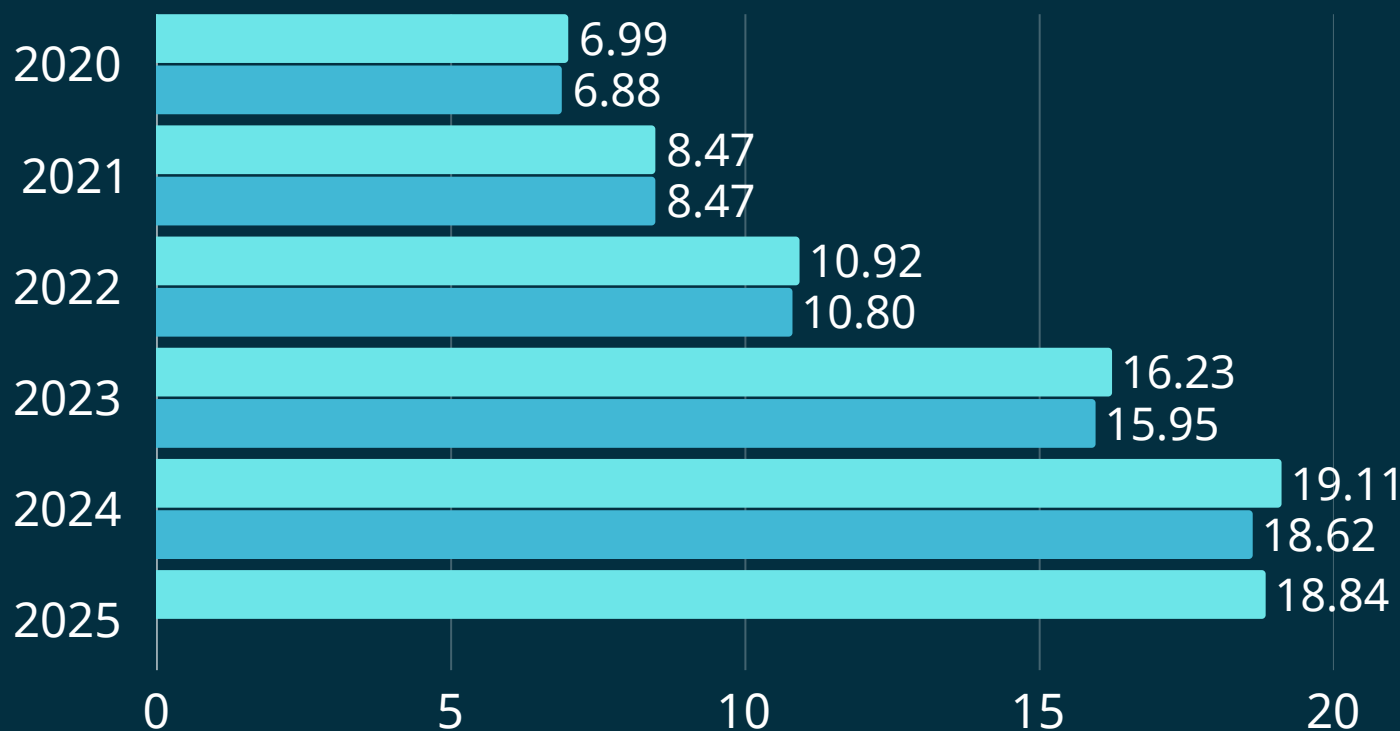
Pagu Anggaran Kejaksaan RI 2026

Upaya pemulihan kerugian negara masih memiliki ruang untuk lebih optimal

Dinamika Anggaran Kejaksaan RI 2020 - 2025

(dalam triliun rupiah)

● Anggaran ● Realisasi

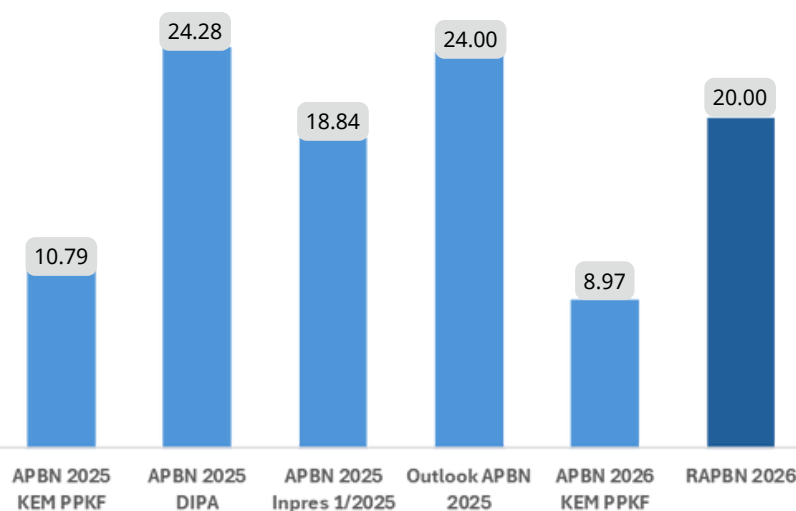


**angka setelah inpres 1/

Sumber: LHP atas LK Kejaksaan RI 2020-2023, Siaran Pers Kejaksaan RI Nomor: PR - 1101/095/K.3/Kph.3/12/2024, Raker Komisi III dengan seluruh mitra K/L (12 Februari 2025), KEM PPKF 2026.

Dinamika Besaran Alokasi Kejaksaan RI 2025 - 2026

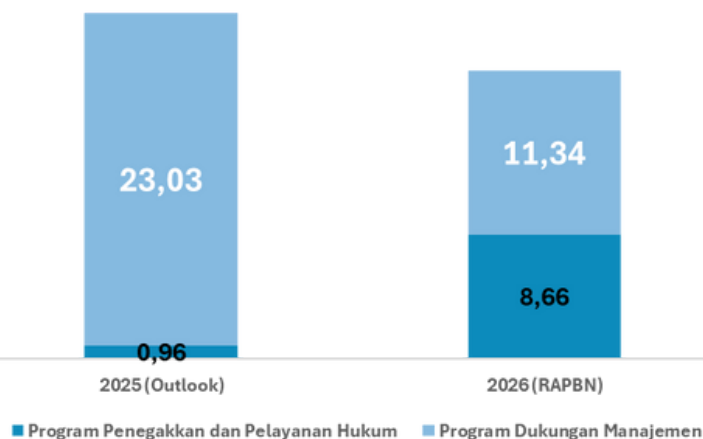
(dalam triliun rupiah)



Sumber: Raker Komisi III dengan seluruh mitra K/L (12 Februari 2025), KEM PPKF 2026. NK 2025, NK 2026

Dinamika Besaran Alokasi Kejaksaan RI 2025 - 2026

(dalam triliun rupiah)



Sumber: NK APBN 2026.

→ Overview Pagu Anggaran 2026

Pagu Anggaran Kejaksaan 2026 berdasarkan Nota Keuangan 2026 adalah sebesar **Rp20 triliun**, dengan alokasi Program Dukungan Manajemen Rp11.342,7 miliar, serta Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum Rp8.657,3 miliar.

Nilai tersebut secara total turun sebesar 20 persen jika dibanding *Outlook* APBN 2025 yang sebesar Rp23,99 triliun. Namun, jika diukur dari besaran pagu indikatif 2026 yang diberikan sebesar Rp8,97 triliun, terdapat kenaikan alokasi yang cukup signifikan mencapai 128% meskipun belum sepenuhnya mengakomodasi usulan sebagaimana yang diajukan Kejaksaan RI. Selain itu, jika tidak ada perubahan signifikan, alokasi anggaran Kejaksaan 2026 juga akan menjadi salah satu yang terbesar dalam 6 tahun terakhir.

→ Pergeseran Proporsi Anggaran Program Kejaksaan RI yang sebelumnya didominasi Dukungan Manajemen

Sepanjang tahun 2021-2023, proporsi terbesar anggaran Kejaksaan RI dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen berkisar antara 92% - 96%. Proporsi tersebut berfluktuasi dan menunjukkan tren meningkat hingga mencapai 96% pada *outlook* 2025 berdasarkan data Nota Keuangan APBN 2026. Namun, di tahun 2026 proporsi Program Dukungan Manajemen diproyeksikan akan turun signifikan dan hanya mencakup 56,7% dari total anggaran. Hal tersebut menyiratkan dinamika strategis dan pergeseran prioritas yang cukup signifikan dalam struktur anggaran atau rancangan program yang dapat bermakna antara lain peralihan fokus ke program substantif sehingga dapat lebih banyak output langsung kepada sektor yang dilayani, dan adanya efisiensi serta restrukturisasi birokrasi.

→ Highlight Isu terkait Kejaksaan

1. Penyelamatan Aset Negara

Jumlah benda sitaan dan barang rampasan dalam rangka penyelamatan aset negara yang ditangani oleh Badan Pemulihan Aset sepanjang tahun 2024 adalah sebesar **Rp1,513 triliun**. Dari jumlah tersebut nilai yang berhasil diselesaikan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah, dan lainnya adalah sebesar **Rp1,413 triliun** atau sebesar 94.60%. Kinerja penyelesaian tersebut meningkat signifikan jika dibandingkan capaian tahun 2023.

Tingginya harga penilaian aset lelang, masih adanya kewajiban pada aset lelang yang masih harus diselesaikan, serta *mindset* masyarakat terkait barang sitaan/rampasan menjadi **kendala** dalam penyelesaian penyelamatan aset negara.

2. Pemulihan Aset Negara

Pada tahun 2024, Badan Pemulihan Aset menangani aset hasil rampasan, sita eksekusi, serta aset hasil penelusuran dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, dan pidana tambahan lainnya dengan nilai mencapai Rp2,32 triliun. Dari jumlah tersebut, aset yang berhasil dilelang hanya sebesar Rp559 miliar atau sekitar 24,05%. Sementara itu, melalui pendampingan terhadap Kementerian/Lembaga, berhasil diamankan aset senilai Rp37,05 miliar dan dilelang sebesar Rp27,5 miliar, sehingga tingkat keberhasilannya mencapai 74,22%.

Dari sisi penyelesaian lelang, total aset yang dilelang sepanjang 2024 senilai Rp559,5 miliar. Namun, yang berhasil disetorkan ke kas negara hanya Rp101,8 miliar atau 18,20% dari total nilai tersebut. Untuk aset yang berasal dari pendampingan Kementerian/Lembaga, nilai lelang tercatat Rp27,5 miliar, dengan realisasi masuk kas negara sebesar Rp5,86 miliar atau 21,32%. Rendahnya tingkat penyelesaian ini antara lain disebabkan oleh minimnya peminat dalam proses lelang.

Hingga 31 Desember 2024, jumlah uang pengganti, denda, dan pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang masih memiliki hak tagih tercatat sebesar Rp21,67 triliun. Dari jumlah tersebut, aset yang berhasil ditangani Badan Pemulihan Aset baru mencapai Rp2,33 triliun atau sekitar 10,74%.

Masih banyaknya aset barang rampasan dan/atau aset beda sita eksekusi yang belum *clean and clear*, aset untuk pemenuhan uang pengganti sudah beberapa kali dilelang namun tidak laku dijual hingga terpidana menjalani subsider, dan proses lelang yang melampaui tahun berjalan merupakan beberapa **kendala** yang menyebabkan kurang optimalnya capaian kinerja penyelesaian pemulihan.

3. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana khusus

Sepanjang 2024 Kejaksaan RI telah mengembalikan kerugian keuangan negara dengan total Rp1,091 triliun (satu triliun sembilan puluh satu miliar rupiah). Total kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan tersebut berasal dari jumlah pengembalian kerugian keuangan negara yang berasal dari barang rampasan, uang sitaan dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap senilai Rp3,809 triliun atau sebesar 28,65%. Sedikit meningkat dari persentase capaian 2023.

Belum optimalnya pencapaian pengembalian kerugian keuangan negara disebabkan beberapa faktor, diantaranya:

1. terpidana lebih memilih menjalani subsider dibandingkan membayar uang pengganti atau denda;
2. penelusuran aset milik terpidana tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga tidak dapat menutupi jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana;
3. proses pelelangan terhadap barang rampasan memerlukan waktu yang lama dan melibatkan pihak lain yaitu KPKNL;
4. proses lelang melampaui tahun berjalan.

➔ Rekapitulasi PNBK Kejaksaan 2024

RINCIAN	JUMLAH
Pendapatan penjualan barang rampasan/ hasil sitaan yang telah diputuskan atau ditetapkan pengadilan	Rp144.841.032.808 (Rp144,84 miliar)
Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah diputuskan atau ditetapkan pengadilan	Rp50.855.745.120 (Rp50,85 miliar)
Pendapatan uang sitaan TPPU	Rp553.784.806.370 (Rp553,78 miliar)
Pendapatan uang pengganti tipikor	Rp.383.038.476.924 (Rp383,03 miliar)
Penjualan hasil lelang TPPU	Rp.7.142.265.394 (Rp7,14 miliar)
Penjualan hasil lelang tipikor	Rp.369.861.884.867 (Rp369,86 miliar)
Denda hasil tipikor	Rp.44.813.824.617 (Rp44,81 miliar)
Denda hasil TPPU	Rp.260.000.000 (Rp260 juta)
Hasil pengembalian uang negara	Rp.14.031.548.269 (Rp14,03 miliar)

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kejaksaan RI 2024

Pengarah

Plt. Kepala Badan Keahlian DPR

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA, QIA, POIA

Penulis

Fachry Ali Firdaus, S.E.

Ratna Christianingrum, S.Si., M.Si.

Tio Riyono, S.E.

Analisis

PAGU ANGGARAN

2025



PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 6
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.bk.dpr.go.id**